Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 2655-8831

EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (KAJIAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016)

Ahmad Jaezuli Al Amin[1], Dzulfikar Rodafi[2], Achmad Faisol[3]
Universitas Islam Malang
e-mail: [1]22101012040@unisma.ac.id, [2]dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id, [3]ach.faisol@unisma.ac.id

Abstrak

The Supreme Court issued PERMA Number 1 of 2016 as a revision of PERMA Number 1 of 2008 with the aim of maximizing the function of mediation to reduce the number of cases and encourage dispute resolution through peace. However, divorce statistics for the 2016–2023 period show a fluctuating trend, even experiencing an increase at the beginning of the regulation's implementation. With the number of cases reaching 365,654 in 2016 and increasing to 438,013 in 2019. This raises questions about the effectiveness and relevance of PERMA Number 1 of 2016 in seeking peace through mediation. This study aims to measure the level of effectiveness of the regulation during its eight years of implementation. The author was interested in conducting this research, because the Religious Court of Kediri Regency achieved achievements in the field of mediation success in 2024. The method used is empirical legal research, which focuses on analyzing the functioning of law in society, especially from the aspect of the effectiveness of legal enforcement. This method serves to see the law in a real sense and examine how the law works in the community. Based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and 2024 mediation data, mediation at the Kediri Regency Religious Court was effective, with a success rate of 62.21% of 379 potential mediation cases. These findings indicate that Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 remains relevant and can function optimally in certain contexts.

Keywords: *Effectiveness, Mediation, PERMA Number 1 of 2016.*

A. Pendahuluan

Pada umumnya perkawinan itu untuk seumur hidup, namun terkadang ada alasan tertentu perkawinan terpaksa diputus dengan sendirinya atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-istri. Proses membina rumah tangga, laksana bahtera mengarungi lautan yang di dalamnya terdapat badai yang sewaktu-waktu dapat menghantam bahtera rumah tangga. Apabila bahtera tersebut dapat bertahan melewati badai rumah tangga maka tujuan pernikahan akan tercapai. Sebaliknya, apabila tidak mampu, maka bahtera rumah tangga akan karam. Perceraian merupakan kejadian yang sangat tidak diharapkan dalam pernikahan, karena akan memutus ikatan yang sangat kuat dan suci antara kedua belah pihak. Kendati

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

demikian, perceraian diperbolehkan oleh syariat dengan syarat dilakukan dengan acara yang baik(Ramdan, 2018).

Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka perceraian melalui penerapan aturan mediasi. Upaya tersebut dimulai dengan diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2002, disusul dengan PERMA Nomor 2 Tahun Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan kemudian PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa proses mediasi menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem peradilan dan wajib ditempuh terlebih dahulu. Langkah ini terus dikembangkan hingga lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai bentuk nyata komitmen Mahkamah Agung dalam menekan tingkat perceraian dengan mediasi yang dinilai cukup berhasil pada awal pelaksanaannya(Andaryuni and Haika, 2018).

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa melalui proses dialog atau perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator guna mencapai kesepakatan bersama. Mediasi juga menjadi salah satu sarana penyelesaian konflik dalam rumah tangga yang memiliki landasan hukum dalam Al-Qur'an, khususnya surat An-Nisa ayat 35, dengan tujuan mencapai solusi yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berfokus pada visi mewujudkan lembaga peradilan yang agung, mediasi berperan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan serta menjadi wujud dari prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau(Zaitullah, Dirosat and Idia, 2020).

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan revisi dan penyempurna dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mengurangi dan menambahkan ketentuan yang dianggap mendukung dalam upaya perdamaian dan relevan, yaitu: pertama, batas waktu mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari. Kedua, kewajiban para pihak untuk hadir langsung dalam mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ketiga, ketentuan iktikad baik dan tidak baik para pihak. Keempat, ketentuan kesepakatan sebagian. Dan kelima, ketentuan tahapan mediator dalam memediasi para pihak.(Syaifudin, 2017)

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun sebagai sebuah kepastian hukum dalam mendamaikan para pihak, ketertiban dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak melalui mediasi. Dengan adanya kewajiban kehadiran para pihak, menjadikan mediasi dapat berjalan, terciptanya ruang komunikasi dalam mencapai sebuah kesepakatan. Jika ada para pihak yang tidak beriktikad baik dalam jalannya mediasi, maka gugatan tersebut tidak akan diterima

dan dikenai sanksi kewajiban membayar biaya mediasi (Pasal 23). Sehingga, mediasi akan tercipta dengan prosedur yang jelas, tertib dan terjadinya dialog untuk mengupayakan harapan perdamaian dari para pihak. Dalam hal ini akan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara, tidak hanya sebagai lembaga memutuskan perkara.

Nyatanya jumlah kasus perceraian pada tahun 2016-2019 beranjak naik tiap tahunnya, dari jumlah kasus 365.654-438.013. Baru pada tahun 2020 menurun menjadi 291.677 kasus. Menaik kembali pada tahun 2022 sebanyak 516.344 dan menurun pada tahun berikutnya 2023 sebanyak 463.654(Dataindonesia.id, 2024). Dari data ini menunjukkan bahwasanya angka perceraian tidak stagnan menurun, justru diawal peraturan PERMA Nomor 1 tahun 2016 angka perceraian melonjak menaik.

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan Moh. Mujibur Rohman (2024), berjudul *"Menakar Efektivitas Mediasi Pasca Regulasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Analisis Pengadilan Agama Pamekasan)"*. Penelitian Mujibur Rohman ini menunjukkan, bahwasanya angka perceraian naik tiap tahunnya pada tahun 2017 hingga pertengahan 2020 pasca diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam penelitian tersebut juga mengatakan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan belum sepenuhnya berjalan efektif, dikarenakan kesadaran masyarakat atas hukum(Rohman, 2024).

Sedangkan skripsi yang ditulis Citra Widyasari (2020), yang berjudul *"Efektivitas Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1-B"*. Menunjukkan, bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pinrang sudah sesuai dengan prosedur PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi belum efektif mengurangi angka perkara dikarenakan faktor penghambat salah satu pihak tidak hadir, sehingga perkara diputus secara verstek(Widyasari, 2020).

Sehingga penulis juga melakukan kajian yang sama terfokus pada efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun, penulis melakukan kajian penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah meraih prestasi dalam Bidang Keberhasilan Mediasi di PTA Surabaya award tahun 2024. Jurnal yang ditulis Mujibur Rohman dan skripsi yang ditulis Citra Widyasari memiliki kesamaan pada penelitian penulis, dalam hal meneliti efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Penulis ingin mengetahui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini masihkan efektif dan relevan dalam mengurangi angka perkara dan mengupayakan permasalahan di pengadilan. Menimbang aturan tersebut telah berjalan dan diterapkan di pengadilan selama 8 tahun lamanya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris, penelitian ini menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dikaji dari salah satu aspek efektifitas pelaksanaan aturan hukum. Penelitian hukum empiris adalah "suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat". Dengan pendekatan perundang-undangan, dimana penulis melakukan kajian data sekunder terlebih dahulu lalu data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan data primer merupakan temuan di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi(Muhaimin, 2020).

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berfokus data pada tahun 2024 sebagai acuan sumber data. Sumber data terbagi menjadi 2 yaitu: pertama data primer, dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kedua data sekunder, berasal dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016, buku-buku, jurnal, skripsi dan dokumen resmi lainnya. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi di lokasi penelitian, melakukan wawancara kepada narasumber mediator, hakim, panitera dan para pihak, dan melakukan dokumentasi ruangan atau dokumen resmi. Teknik analisis data menggunakan pendapat Miles dan Huberman yang dibagi menjadi 3 yaitu: pertama Reduksi Data, Kedua Penyajian Data dan Ketiga Penarikan Kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dengan melakukan pengamatan secara cermat terhadap data yang dikumpulkan dengan analisis deskriptif untuk menguraikan, mengutip dan memperjelas data yang telah dikumpulakan. Terakhir dengan komperatif, membandingkan pendapat dengan beberapa pendapat yang lain.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam proses peradilan di indonesia. Peraturan ini memuat aturan prosedur mediasi, ketentuan mediator, kesepakatan perdamaian, jangka waktu mediasi, dan tempat penyelenggara mediasi. Maka penulis membagi menjadi 3 bagian dalam penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu:

a. Mediator

PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 1, dijelaskan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Mediator Hakim Nomor 110/KPA.W13-A9/SK.HKI.2.5/I/2025, menetapkan 5 Hakim yang mendapat mandat sebagai Mediator Hakim. Dan pada Surat Keputusan nomor 72/KPA.W13-A9/SK.HKI.2.5/I/2024, bahwasanya ditetapkan 2 Mediator Non Hakim yang mendapat mandat sebagai Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Sehingga total mediator hakim dan non hakim di Pengadilan Agama Kabupaten yang bertugas berjumlah 7 mediator.

Dalam pasal 1 ayat 4, daftar mediator adalah catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri daftar mediator diletakkan di 3 titik, diluar ruang mediasi, disamping pintu masuk ruang sidang 3 dan disamping pintu ruang sidang nusantara.

Pasal 13, mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang telah dinyatakan lulus dalam sertifikasi mediator yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebanyak 2 mediator non hakim telah memiliki sertifikat mediator, yaitu: H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H. sertifikat bernomor: BP4 Pusat 159/8-P/BP4/IX/2016, dan Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy. sertifikat bernomor: BP4 Pusat 178/8-P/BP4/XII/2016.

Menurut Kusumaningrum, kualifikasi mediator menjadi alat ukur keberhasilan efektivitasnya mediasi. Dengan profesionalitas dan keahlian mediator dibidang hukum formil, materiil dan psikologis menjadikan pengaruh dalam pelaksanaan mediasi mencapai sebuah keberhasilan(Kusumaningrum *et al.*, 2017). Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mempersiapkan mediasi secara serius. Pembagian mediator sesuai dengan keahliannya masing-masing, seperti Bapak Munasik mediator hakim dikhususkan untuk menyelesaikan dalam mediasi perkara waris. Dalam penanganan perkara kewarisan mediasi paling banyak dilaksanakan oleh

mediator hakim Bapak Munasik, beliau dipercaya memberi presentase keberhasilan yang tinggi dalam mediasi.

Ibu Titik selaku Panitera Muda Hukum mengatakan dalam wawancaranya:

> *"Pada tahun 2024 masih ada Bapak Munasik sebagai Mediator Hakim yang ahli dalam bidang ilmu waris. Seluruh sengketa perkara kewarisan dimediasikan oleh beliau. Karena beliau paham betul mengenai perhitungan waris dari berbagai referensi ilmu waris islam, adat dan hukum positif. Sehingga banyak dari perkara waris yang berhasil dimediasikan dengan kesepakatan perdamaian perkara dicabut, dengan kesepakatan mengikuti hitungan yang telah beliau hitung sesuai dasar bidang ilmu yang disepakati kedua belah pihak".*

Menurut Dede Anggraini, bahwa kualifikasi mediator sangat berpengaruh untuk menunjang keefektifan PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memerlukan mediator yang telah menempuh pelatihan khusus mediator sehingga pada saat melakukan mediasi memiliki berbagai cara dalam menyelesaikan sengketa dengan damai(Elda, 2017).

Dalam hal ini, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menyiapkan mediator sudah lengkap terdiri dari mediator hakim dan mediator non hakim, untuk memberikan ruang kepada para pihak untuk memilih mediator yang akan membantunya dalam mediasi. Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga sudah tersertifikasi sertifikat mediator dari Mahkamah Agung. Dan memiliki strategi pembagian mediator dalam menangani mediasi dari perkara tertentu.

b. Tempat Penyelenggara Mediasi

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kefektifan suatu hukum adalah fasilitas dan sarana yang ada dalam menunjang terlaksananya hukum tersebut(Asyhadi, 2019). Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki fasilitas dan sarana dalam proses mediasi, yaitu 1 ruang khusus mediasi yang difasilitasi Air Conditioner. Dengan luas ruangan sekitar kurang lebih 3x4 m^2. Ruangan terletak dekat di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan kondisi tertutup, sehingga dipastikan para pihak yang menunggu/mengantri diluar ruang mediasi tidak akan terdengar segala aktifitas yang ada didalam ruangan.

Didalam ruangan mediasi terdapat meja hijau besar yang ditengah-tengahi 1 kursi untuk mediator dan 2 kursi yang saling berseberangan untuk para pihak. Diatas meja hijau besar terdapat vas bunga, permen dan air

mineral gelas. Disetiap sisi dinding terdapat bingkai dan poster berisi narasi peringatan, nasihat akibat hukum jika terjadinya perceraian anak adalah korbannya. Dibelakang ruangan disekat dengan triplek yang mana dibaliknya ada ruangan untuk sekertaris dalam mencatat berita mediasi.

Pada pasal 11, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah menerapkan mengenai tempat penyelenggaraan mediasi. Mediator Non Hakim Bapak Huda-pun selalu melaksanakan mediasi di ruang mediasi khusus tersebut. Terkadang untuk mediasi perkara waris yang dimediasikan oleh Mediator Hakim biasanya di ruang sidang nusantara. Namun dalam sarana alat komunikasi audio visual jarak jauh didalam ruang mediasi belum tersedia. Sehingga jika terjadi mediasi yang membutuhkan komunikasi jarak jauh, maka proses mediasi harus berpindah ke ruang sidang nusantara.

c. Prosedur Mediasi

a) Tahap Pra Mediasi

Sidang pertama yang dihadiri kedua para pihak, dimulai dengan Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menanyakan para pihak mengenai maksud hadir dipersidangan ini, lalu menasehati para pihak memberi pandangan mengenai sengketa dan memberikan penjelasan kewajiban mediasi para pihak(pasal 17 ayat 1). Menasehati para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya dengan perdamaian, agar tidak ada dari salah satu pihak yang dirugikan. Pihak yang tidak hadir pada sidang pertama akan dipanggil sekali lagi sesuai dengan praktik hukum acara. Mediasi akan tetap diselenggarakan, jika setelah pemanggilan dilakukan salah satu pihak tidak hadir.

Hakim pemeriksa perkara menjelaskan tata cara mediasi ke para pihak mengenai manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk hadir langsung, akibat hukum tidak beriktikad baik dan biaya yang timbul dalam mediasi. Setelah menjelaskan tata cara mediasi kepada para pihak sesuai dengan Pasal 17 ayat 6, hakim menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak telah memperoleh penjelasan tata cara mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa, memahami tata cara mediasi dengan baik, dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik. Formulir penjelasan mediasi tersebut kemudian ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukumnya dan diarsipkan dalam berkas perkara yang nantinya akan dicantumkan dalam berita acara persidangan.

Setelah memberikan penjelasan, Hakim pemeriksa perkara mempersilahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi saat itu juga di ruang mediasi khusus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah disediakan. Para pihak akan dimediasi oleh Bapak Huda selaku Mediator Non Hakim.

b) Tahap Proses Mediasi

Di ruang khusus mediasi para pihak menghadap Bapak Huda selaku mediator non hakim untuk menyerahkan resume perkara. Sesuai dalam pasal 14, mediator menjelaskan mengenai tahapan proses mediasi dimulai dengan memperkenalkan diri dan mengkroscek nama para pihak, menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi, menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral tidak memihak, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dengan bergantian, dan mendorong para pihak untuk mencapai penyelesaian permasalahan yang terbaik.

Mediasi dengan dorongan mediator diselesaikan saat itu juga. Bapak Huda memberikan aturan mengenai jalannya mediasi, pertama, mempersilahkan penggugat untuk memberikan keterangan mengenai asal masalah dan tuntutan perkara kepada tergugat. Kedua, mempersilahkan tergugat untuk mengklarifikasi asal masalah dan menjawab tuntutan perkara. Ketiga, mediator menengahi dan memberikan pandangan ketentuan mengenai asal masalah dan tuntutan perkara. Keempat, mediator mendorong dan meyakinkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan, mediator juga sesekali memberi pandangan akan resiko yang dialami kedepan tentang akibat hukum.

Mediator juga memberikan penjelasan mengenai kesepakatan sebagian, dengan mempertimbangkan resiko dan akibat hukum yang terjadi jika tidak terjadi upaya perdamaian. Dan menegaskan kembali mengenai iktikad baik dan tidak baiknya para pihak dalam melakukan proses mediasi.

Mengenai ketentuan kesepakatan sebagian dalam pasal 26 ayat 2:

> *"Dalam hal para pihak hanya mencapai kesepakatan sebagian, Mediator membuat laporan mediasi dan memuat kesepakatan tersebut sebagai bagian dari laporan, dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara atas bagian yang tidak disepakati."*

Pasal 27 ayat 1:

> *"Kesepakatan sebagian dapat dituangkan dalam bentuk akta perdamaian atas bagian yang disepakati, dan terhadap*

bagian yang tidak disepakati, pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh Majelis Hakim."

Pasal 31 ayat 1-3:

"(1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian. (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan berkekuatan hukum tetap."

Dan mengenai ketentuan beriktikad baik dan tidak beriktikad baik pada pasal 7 ayat 1-2:

"Ayat 1: Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. Ayat 2: Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

a) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
b) Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut turut tanpa alasan sah;
c) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
d) Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
e) Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah."

Setelah mediasi selesai, mediator menyampaikan kesepakatan sebagian kepada Hakim pemeriksa perkara sebagai lampiran laporan mediator dengan memperhatikan pasal 27 ayat 2, dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan
b. Merugikan pihak ketiga
c. Tidak dapat dilaksanakan.

Lalu hakim pemeriksa perkara melanjutkan pemeriksaan objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil pada agenda sidang selanjutnya, beserta laporan mediator yang telah disampaikan.

2. *Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.*

Menurut Ahmad Ali, umumnya yang mempengaruhi efektivitas pada peraturan perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan, peran, wewenang, dan fungsi dari penegak hukum dalam menjalankan tugas atau dalam penegakan hukum yang telah mengikat pada mereka(Zaitullah, Dirosat and Idia, 2020). ditambah menurut Soerjano Soekanto juga menegaskan bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif, apabila mempunyai dampak hukum yang positif. Hukum tersebut berhasil menuntun atau mengubah perilaku manusia hingga menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum(Fauziyah Hayati, Busyro, 2021).

Berdasar teori efektivitas hukum Soerjano Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri.

Faktor hukum yang dimaksud adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dimana aturan mediasi sendiri sudah cukup jelas, rinci dan lebih fleksibel dibandingkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Kehadiran para pihak diwajibkan untuk menciptakan komunikasi dan dorongan perdamaian. Didampingi dan difasilitasi oleh mediator yang harus memiliki sertifikat mediator. Ketentuan iktikad baik dan akibat hukum tidak beriktikad baik, jika terjadi para pihak tidak beriktikad baik maka gugatan tidak akan diterima. Dan adanya ketentuan kesepakatan sebagian untuk mengurangi beban resiko yang ditanggung para pihak.

Sehingga peraturan ini sudah cukup kuat untuk memfasilitasi para penegak hukum dalam mengupayakan para pihak agar mencapai kesepakatan perdamaian. Tinggal bagaimana komitmen para penegak hukum untuk maksimal dalam menerapkan aturan ini sebaik mungkin agar dapat mencapai tujuan dari aturan tersebut.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud adalah bentuk atau format yang mencakup unsur kelembagaan, penegakan hukum, layanan hukum,

dan manajemen hukum umum, seperti badan legislatif, yudikatif, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara, yang antara lain mengawasi pembentukan atau penyediaan layanan hukum. Ini mencakup pihak-pihak yang menciptakan dan melaksanakan hukum, dalam hal ini hakim, mediator, dan layanan hukum yang ada(Mubarok, 2018).

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan baik. Mediator sudah terdiri dari mediator hakim dan non hakim. Mediator sudah tersertifikasi sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Mediator sudah menjalankan tahapan-tahapan sebagai mediator dalam proses mediasi. Daftar mediator juga sudah ditempatkan dikhalayak umum agar dapat diakses dengan mudah oleh para pihak.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga memiliki strategi dalam penanganan mediasi perkara kewarisan, perkara kewarisan biasanya ditangani oleh mediator hakim Bapak Munasik yang memiliki kemampuan dan keahlian intelektual mengenai ilmu waris. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga perkara kewarisan dimediasi oleh mediator hakim dan non hakim yang lainnya jika para pihak menghendaki yang lain.

c. Faktor Fasilitas dan Sarana

Faktor fasilitas dan sarana yang dimaksud adalah ruang penyelenggara mediasi. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah memiliki ruang khusus mediasi, dengan beberapa fasilitas dan sarana yang sudah cukup lengkap untuk mendukung jalannya mediasi. Disediakan juga permen dan air mineral sebagai siasat mereda emosional dari para pihak. Namun dalam ruang khusus mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri belum memiliki fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, sehingga jika terjadi proses mediasi yang diharuskan para pihaknya menggunakan audio visual jarak jauh, maka harus berpindah ke Ruang Sidang Nusantara.

d. Faktor Kepatuhan Masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cukup tinggi, berdasarkan dari jumlah perkara yang dapat dimediasi. Sebagian masyarakat kooperatif mengikuti tahap-tahapan mediasi sehingga mencapai sebuah kesepakatan. Sebagian hanya mengikuti mediasi sebatas formalitas untuk perkara segera berlanjut ke meja persidangan, dan tidak banyak para pihak yang tidak beriktikad baik enggan mengikuti proses mediasi dikarenakan emosional yang sudah memuncak.

e. Faktor Budaya Masyarakat

Faktor budaya masyarakat juga menjadi faktor keberhasilan dalam mediasi, masyarakat Kabupaten Kediri yang berasal dari pedesaan memiliki kultur budaya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Dan sebagian besar masyarakat belum mengetahui mengenai aturan mediasi yang diterapkan di Pengadilan, sehingga terkadang masyarakat menganggap proses mediasi sebagai penghambat dalam mediasi.

Efektivitas atau tidaknya suatu hukum juga dapat dilihat dari sebuah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan aturan hukum tersebut(Fuah, 2024). Laporan mediasi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan mediasi dan efektif atau tidaknya suatu aturan mediasi dalam mengupayakan perdamaian di Pengadilan. Adapun laporan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2024, sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih dalam proses Mediasi
			Gagal	Berhasil	Tidak Layak	
1	Januari	40	10	27	1	2
2	Februari	39	11	20	1	7
3	Maret	28	8	18	1	1
4	April	25	10	16	3	1
5	Mei	36	8	26	2	0
6	Juni	28	12	14	1	1
7	Juli	29	9	15	1	0
8	Agustus	34	6	26	1	1
9	September	41	19	22	0	0
10	Oktober	25	8	17	0	0
11	November	23	6	17	0	0
12	Desember	31	12	19	0	0
Jumlah		379	119	237	11	13

Berdasarkan tabel diatas merupakan data laporan mediasi pada tahun 2024, perkara yang dapat dimediasi di Pengadilan Kabupaten Kediri dari bulan Januari-Desember sebanyak 379 perkara. Dengan perincian perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 237 perkara, 119 perkara tidak berhasil dimediasi, 11 perkara tidak layak dan 13 perkara masih dalam proses mediasi. Lebih detail lagi perkara yang dapat dimediasi terdiri dari beberapa jenis perkara, yaitu:

No	Jenis Perkara							Keberhasillan		Gagal/ Tidak Berhasil	Jumlah
	Cerai		Hadhanah	Harta Bersama	Waris	Poligami	DLL	Berhasil	Sebagian		
	Talaq	Gugat									
1	125	203	9	4	3	3	4	12	220	119	351
Jumlah								232		119	

Dari tabel 1.3 diatas merupakan data perincian mengenai jenis perkara mediasi yang berhasil dan tidak berhasil. Jenis perkara terdiri dari perkara Cerai Talaq 125 perkara, Cerai Gugat 203 perkara, Hadhanah 9 perkara, Harta Bersama 4 perkara, Waris 3 perkara, Poligami 3 perkara, dan lain-lain seperti isbat nikah, hibah dan wakaf sebanyak 4 perkara. Kesimpulannya 232 perkara yang berhasil dimediasi dan 119 gagal dimediasi. Dan total keseluruhan perkara 351 perkara.

Data diatas merupakan hasil dari penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam mediasi dan juga strategi mediator dalam melakukan mediasi kepada para pihak. Sehingga jika dihitung presentase laporan mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berhasil dimediasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

$$\frac{x}{y} \times 100\% = \frac{232}{379} \times 100\% = 61{,}21\%$$

Dari perhitungan diatas, X merupakan jumlah perkara yang berhasil dimediasi, y merupakan jumlah perkara yang sudah dimediasi. Dapat diketahui bahwa perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama tahun 2024 adalah sebesar 61,21% dari semua perkara yang dapat dimediasi dari bulan Januari sampai Desember 2024. Data ini menunjukkan bahwasanya mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat mencapai sebuah tujuan dan keberhasilan, walaupun angkanya belum mencapai titik maksimal 100%. Sehingga PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini masih relevan diterapkan dan efektif dalam mengurangi angka dan resiko perkara yang terjadi, tinggal bagaimana Pengadilan menerapkan, mengelola dan memiliki strategi yang maksimal.

3. Strategi Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dengan Menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Mediasi tidak akan pernah terjadi tanpa adanya peran mediator, sebagai pihak ketiga atau juga disebut penengah. Mediator mempunyai peranan

penting, yaitu merumuskan, mengajak pihak berpekara agar dominan terlibat langsung dalam pencapaian kesepakatan tersebut. Tentu dengan setiap kelebihan, kesanggupan, ketrampilan, dan jam terbang dari mediator itu sendiri yang secara khusus membedakan antara mediator satu dan lainnya(Syaifudin, 2017).

Keberhasilan mediasi juga bisa dilihat dari efektivitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada profesionalitas hakim mediator dan non hakim dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian dibidang hukum formil dan materiil, dan juga keahlian dibidang psikologis), dan hakim mediator harus bersertifikat(Kusumaningrum *et al.*, 2017).

Untuk mewujudkan mediasi yang efektif dan berhasil, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengupayakan profesionalitas mediator hakim maupun non hakim. Beberapa mediator hakim dan non hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah bersertifikat mediator sesuai dengan sertifikasi dalam PERMA No.1 Tahun 2016. Tidak hanya itu, mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam melaksanakan mediasi memiliki beberapa strategi-strategi yang dilakukan agar para pihak dapa mengupayakan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan perdamaian, yaitu:

a. Analisis Karakter

Keberhasilan mediasi tidak hanya dikarenakan para pihak yang bersengketa, tetapi ditentukan juga dengan kompetensi dan profesionalitas mediator, kemampuan dan kelihaian menjadi titik tertinggi dalam keberhasilan mediasi. Mediator harus bisa menciptakan suasana mediasi yang tenang, tidak tegang antara mediator dengan para pihak, dan mampu berkomunikasi dengan baik dan dengan bahasa yang mudah dimengerti(Mega Haryuni, Muhammad Darwis, 2024).

Strategi awal yang diterapkan oleh para mediator adalah melakukan analisis karakter terhadap para pihak. Menurut keterangan Bapak Huda selaku Mediator Non-Hakim, dalam proses mediasi penting bagi mediator untuk memahami latar belakang psikologis dan karakter masing-masing pihak, karena hal tersebut akan menentukan pendekatan komunikasi yang paling efektif. Selain itu, mediator perlu memberikan ruang yang cukup bagi para pihak untuk menyampaikan keinginan dan keluhannya secara terbuka tanpa tekanan, guna membangun rasa saling percaya (trust) dalam proses mediasi. Menurut Bapak Huda:

> *"Dalam mediasi kita harus bisa memahami karakter dari para pihak, bagaimana cara pendekatan komunikasi kita, memberikan ruang bicara terlebih dahulu kepada para pihak*

apa yang diinginkan dan dikeluhkan, memberikan pemahaman tentang kondisi keadaan masing-masing pihak jika permasalahan/perkara terus berlarut, memberikan solusi atas masalah agar diselesaikan secara kekeluargaan perdamaian"

Apabila setelah dilakukan pendekatan tersebut para pihak tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk berdamai, maka strategi selanjutnya yang dilakukan oleh mediator adalah mengarahkan mereka pada kesepakatan sebagian (*partial agreement*). Kesepakatan sebagian ini merupakan bentuk penyelesaian sebagian dari objek sengketa, yang meskipun tidak mengakhiri seluruh perkara, tetap memberikan manfaat hukum dengan meminimalkan konflik yang lebih besar dan mempersempit ruang lingkup perselisihan di persidangan. Strategi ini juga sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas peradilan sebagaimana diamanatkan dalam asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menjadi dasar pelaksanaan peradilan di Indonesia.

b. Pemberian Pemahaman Mengenai Resiko

Strategi lanjutan yang digunakan terutama ketika para pihak bersikeras melanjutkan perceraian adalah pemberian pemahaman mengenai risiko perceraian**.** Bapak Huda menjelaskan bahwa mediator akan memberikan gambaran mengenai dampak psikologis dan sosial terhadap anak, kondisi ekonomi pascaperceraian, serta kemungkinan disintegrasi keluarga yang lebih luas. Tujuannya adalah membangkitkan kesadaran para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Bapak Huda mengatakan:

"Dengan memberi faham kepada mereka (para pihak) resiko akan terjadinya perceraian seperti, nanti jika bercerai bagaimana kondisi psikis seorang anak? Bagaimana mental anak dalam lingkungan sosial ketika mengerti orang tuanya bercerai? Bagaimana kondisi masing-masing pihak jika berpisah dalam hal ekonomi?. Hal-hal tadi tersebut ini yang akan menjadi pertimbangan dan mensadarkan para pihak untuk berfikir ulang. Kebanyakan dari mereka (para pihak) ngerti ko kalo dikasih paham mengenai resiko yang akan terjadi."

Seperti yang dikemukakan oleh Simatupang dalam penelitiannya, karena itu mediator dituntut memiliki pemahaman yang mendalam mengenai penyebab perkara dan hambatan termasuk memberi pengetahuan kepada para pihak akan resiko yang terjadi(Simatupang, Siregar and Harahap, 2023).

Tetapi memang tidak sedikit dari para pihak yang tetap ingin melanjutkan perceraian, dikarenakan terkadang dari beberapa mereka (para pihak) sudah mempersiapkan pengasuhan anak yang akan dilimpahkan ke orang tuanya, dan beberapa persiapan kemungkinan yang lainnya, lanjut Bapak Huda.

Kebanyakan dari beberapa para pihak yang sudah kekeh dalam prinsipnya untuk perceraian dan perkara lain, dikarenakan masalah yang sudah terpendam lama dan tidak ada penyelesaian permasalahan lagi selain diselesaikan dimeja Pengadillan Agama. Menurut Bapak Huda:

> *"Jika memang sudah seperti itu, kita sebagai mediator sudah memberi faham tentang resiko, ketentuan akibat hukum, dan memberikan arahan untuk kehidupan yang lebih baik, itu sudah menjadi ikhtiar maksimal dari kami jika tidak mencapai kesepakatan atau gagal".*

c. Refleksi Keluarga

Strategi ini di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri biasa dilakukan oleh mediator Hakim dalam memediasi para pihak yang bersengketa dalam perkara kewarisan. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak seluruhnya perkara yang dapat dimediasi dilimpahkan kepada Mediator Non Hakim untuk dimediasikan, sebagian dalam perkara kewarisan yang berskala besar dilimpahkan atau ditugaskan oleh Ketua Pengadilan untuk dimediasikan oleh Mediator Hakim. Dikarenakan memang ada Mediator Hakim yang ahli bidang ilmu waris.

Menurut Bapak Munasik tentang strategi yang dilakukannya:

> *"Dalam perkara waris seorang mediator harus memiliki opsi-opsi yang ditawarkan kepada mereka (para pihak). Sebelum opsi itu disampaikan kepada para pihak, mediator harus paham bicara tentang kuburan (pewaris yang telah meninggal) orang tua ataupun kerabat. Orang mati yang dibutuhkan kiriman doa dan sedekah kamu (para pihak), bukan keributan yang dicari oleh ahli waris, sentuh hatinya bahwa harta waris bukan kamu (para pihak) yang mencari."*

Dengan merefleksikan para pihak tentang keluarga, pewaris yang telah meninggalkan mereka (para pihak), menjadikan mereka lembut hatinya. Setelah itu mediator baru menyampaikan opsi-opsi penyelesaian pembagian waris dengan hukum yang memang disetujui dan disepakati bersama oleh para pihak. Bapak Munasik biasa menawarkan dengan ketentuan hukum islam dalam pembagian waris dan memperkenankan

ketentuan hukum lainnya, akhirnya mediasi berhasil dengan penyelesaian kesepakatan pembagian secara kekeluargaan.

D. Simpulan

Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedural hukum. Dimulai dengan dalam penentuan mediator, tahapan tugas mediator, sertifikasi mediator dan daftar mediator. Kemudian fasilitas dan sarana yang sudah disediakan dengan cukup layak, ruang mediasi bersifat tertutup dan khusus sehingga dapat mendukung jalannya mediasi. Dan prosedur mediasi juga berjalan cukup baik dan sesuai.

Dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjano Soekanto dan berdasarkan laporan mediasi pada tahun 2024, mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berjalan efektif. Tingkat keberhasilan mediasi mencapai presentase keberhasilan 62,21% dari 379 perkara yang bisa dimediasi. Dapat dikatakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan masih relevan dan efektif dalam mengurangi angka perkara di Pengadilan.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga memiliki beberapa strategi-strategi dalam memediasi para yang diterapkan dan dimiliki oleh para mediator hakim dan non hakim, sehingga mediasi dapat dicapai dengan sebuah kesepakatan sebagian dan keseluruhan, yaitu: pertama, analisis karakter, kedua, pemberian pemahaman mengenai resiko dan ketiga refleksi keluarga.

Daftar Rujukan

Andaryuni, L. and Haika, R. (2018) 'Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama', *Fenomena*, 10(2), pp. 95–116. Available at: https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1231.

Asyhadi, F. (2019) 'Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang Farhan Asyhadi Penyelesaian sengketa dapat non litigasi melalui proses perundingan pemecahan masalah di mana pihak luar bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perj', *Justisi Hukum*, 4, p. 44.

Dataindonesia.id (2024) *(Laporan) Kumpulan Data Seputar Perceraian di Indonesia 8 Tahun Terakhir hingga 2023*. Available at: https://assets.dataindonesia.id/2024/10/15/1728964430479-12-Laporan-Kumpulan-Data-Seputar-Perceraian-di-Indonesia-8-Tahun-Terakhir-hingga-2023.pdf.

Fauziyah Hayati, Busyro, B. (2021) 'Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Fenomenologi Di Pengadilan Agama Bukittinggi',

6(1), pp. 63–79.
Fuah, M. (2024) 'Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum', *Desiderata Law Review*, 1(2), pp. 35–44.
Kusumaningrum, A. *et al.* (2017) 'Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang', *Diponegoro Law Journal*, 6(1), pp. 1–10. Available at: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/.
Mega Haryuni, Muhammad Darwis, A. (2024) 'Karakterisritik Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis', 11(3), pp. 297–310.
Mubarok, A. (2018) *Peran Dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)*.
Muhaimin (2020) *Metode Penelitian Hukum*. Fatia Hijr. mataram: mataram university press.
Ramdan, F. (2018) 'Hak Hadhanah dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1(2).
Rohman, M.M. (2024) 'Menakar Efektivitas Mediasi Pasca Regulasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Analisis Pengadilan Agama Pamekasan)', *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada …*, 4, pp. 1–24. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Moh-Rohman-3/publication/378938312_Menakar_Efektivitas_Mediasi_Pasca_Regulasi_PERMA_Nomor_1_Tahun_2016_Studi_Analisis_Pengadilan_Agama_Pamekasan/links/65f265091f0aec67e288d04b/Menakar-Efektivitas-Mediasi-Pasca-Regulasi.
Simatupang, I.T.S., Siregar, I. and Harahap, I. (2023) 'Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian', *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan*, 22(1), pp. 18–34. Available at: https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12925.
Syaifudin, A. (2017) 'Efektifitas peraturan mahkamah agung tentang prosedur mediasi terhadap peran mediator di pengadilan agama sidoarjo', 07(1).
Widyasari, C. (2020) *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Zaitullah, R., Dirosat, I. and Idia, I.A. (2020) 'Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No . 1 Tahun 2016 Abstrak : Kata Kunci : Pendahuluan Dalam proses perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, 2(2), pp. 142–157.